



SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA PASCA KRISIS EKONOMI PADA MASA REFORMASI

HISTORY OF INDONESIAN ECONOMY POST ECONOMIC CRISIS DURING THE REFORMATION PERIOD

Chelsea Mawar Az-Zahra¹, Hanin Anggraini², Rangga Ananta³, Heni Noviarita⁴

^{1,2,3,4}Ekonomi Syariah, Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

Email: chelseaazzahra820@gmail.com¹, haninanggraini@gmail.com², ranggananta5632@gmail.com³,

heninoviarita@radenintan.ac.id⁴

Article history :

Abstract

Received : 10-12-2024

Revised : 12-12-2024

Accepted: 14-12-2024

Published: 17-12-2024

Indonesia's economic history is a compilation of various influences, ranging from traditional to modern economic systems. Due to colonialism, war, and various government policies, Indonesia has undergone dramatic changes since the pre-colonial era, which was characterized by agriculture and trade. After independence, Indonesia has built a strong national economy, but still faces many challenges, such as economic crises and globalization. During the Dutch era, Indonesia's economic history was marked by intensive exploitation of marine resources and the forced cultivation system. This period highlights the structural legacies that are still very much in place today. From the Old Order to the New Order, Indonesia has experienced several economic development initiatives since the end of the war. The purpose of this discussion is to understand how the country's economic system has changed over time and understanding the historical context allows us to identify factors that have influenced economic growth and decline over time, and make education a valuable tool to overcome economic challenges. This study uses a literature review approach with a descriptive qualitative approach. The results of the study indicate that changes in economic policy after the New Order had a significant impact on economic growth and income distribution in Indonesia. Deregulation and liberalization of the financial sector, although encouraging short-term economic growth, also widened inequality.

Keywords : Economic History, Economic Crisis and Reform

Abstrak

Sejarah perekonomian Indonesia merupakan kompilasi dari berbagai pengaruh, mulai dari sistem ekonomi tradisional hingga modern. Akibat kolonialisme, perang, dan berbagai kebijakan pemerintah, Indonesia telah mengalami perubahan dramatis sejak era pra-kolonial, yang ditandai dengan pertanian dan perdagangan. Setelah kemerdekaan, Indonesia telah membangun ekonomi nasional yang kuat, tetapi masih menghadapi banyak tantangan, seperti krisis ekonomi dan globalisasi. Selama era Belanda, sejarah ekonomi Indonesia ditandai dengan eksploitasi sumber daya laut secara intensif dan sistem tanam paksa. Periode ini menyoroti warisan struktural yang masih sangat berlaku hingga saat ini. Dari era Orde Lama hingga Orde Baru, Indonesia telah terjadi beberapa inisiatif pembangunan ekonomi sejak berakhirnya perang. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami bagaimana sistem ekonomi negara ini telah berubah sepanjang waktu dan memahami konteks historis memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang telah



memengaruhi pertumbuhan dan penurunan ekonomi dari waktu ke waktu, dan menjadikan pendidikan sebagai alat yang berharga untuk mengatasi tantangan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari studi yang dilaksanakan mengindikasikan jika perubahan kebijakan ekonomi pasca-Orde Baru mempunyai pengaruh yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di Indonesia. Deregulasi dan liberalisasi sektor keuangan, meskipun mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek, juga memperlebar ketimpangan.

Kata Kunci : Sejarah Perekonomian, Krisis Ekonomi dan Reformasi

PENDAHULUAN

Sejarah perkembangan perekonomian merupakan indikator penting untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, ketika ia menghadapi berbagai tantangan seiring berjalannya waktu. Hal ini khususnya relevan untuk dibahas secara bahasa dan tertulis guna memahami dasar-dasar dan realitas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang paling umum dalam bahasa ini adalah pendekatan historis, karena dianggap sebagai cerminan sejarah dan riwayat kinerja Bangsa Indonesia. Akibatnya, sejumlah aspek perjalanan Bangsa Indonesia akan terpengaruh dan dapat menjadi panduan bagi pembangunan ekonomi negara tersebut. Raharjo menjelaskan jika sistem ekonomi yaitu sistem yang dipergunakan oleh sebuah negara dalam mengembangkan serta mengelola ekonominya serta untuk mendistribusikan sumber dayanya, termasuk barang-barangnya, kepada warga negara dan organisasinya. Menurut M. Hatta, sistem ekonomi adalah sistem yang dapat menyesuaikan perekonomian untuk menjadi keadaan yang stabil di suatu negara dan harus didasarkan pada asas kekeluargaan.

Kebijakan ekonomi selalu menjadi alat penting untuk memengaruhi pembangunan dan kemajuan suatu negara. Sebagai negara dengan kekayaan laut, Indonesia telah menghadapi banyak tantangan ekonomi sejak awal mula. Jurnal Sejarah Perekonomian Indonesia hadir dengan tujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan menafsirkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari satu periode ke periode berikutnya. Melalui penelitian tentang studi ekonomi historis, jurnal ini memiliki tujuan dalam memberikan pengetahuan yang lebih menyeluruh tentang tantangan ekonomi saat ini dan konteks historis yang mendasarinya. Diharapkan hal ini dapat berkontribusi pada kemajuan pengetahuan ekonomi dan menjadi panduan bagi para peneliti, akademisi, dan mereka yang membuat kebijakan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur. Tinjauan pustaka adalah proses sistematis mengevaluasi, mengumpulkan, dan mensintesis literatur yang berkaitan dengan suatu materi riset. Memiliki tujuan yakni memiliki pemahaman perkembangan studi terdahulu, melakukan identifikasi ketimpangan pemahaman, serta menyediakan landasan teori yang kuat terhadap penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data artikel ini adalah dengan menelusuri sejumlah sumber referensi berbentuk buku, jurnal, berita maupun karya ilmiah lain yang memiliki hubungan dan analisis dengan lebih lanjut yang berkaitan dengan topik penelitian, kemudian penulis melakukan analisis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan terkait topik penelitian tersebut.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perekonomian Indonesia

Kebijakan ekonomi kolonial Belanda memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan ekonomi Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada masa tersebut, sektor perkebunan menjadi fokus utama, dengan Belanda mengendalikan dan mengembangkan komoditas-komoditas penting seperti karet, kelapa sawit, tembakau, tebu, dan kopi (Inanna,& Nurjannah.(2023)

Indonesia menempati posisi strategis yang penting dalam lanskap geopolitik antara Asia dan Eropa, serta antara Pakistan dan India. Jalur sutra, atau yang dikenal juga dengan nama jalur sutra laut, membentang dari Tiongkok dan Indonesia menuju India melalui Selat Malaka. Salah satu rutenya mengarah ke Persia melewati Suriah menuju kawasan Tengah, sementara rute lainnya menuju Laut Merah melalui Mesir, dan jalur terakhir mengarah ke kawasan Tengah (W.S,Winkel,1983)

Pada abad pertama, dimulailah perdagangan maritim antara India, Thailand, dan Indonesia, yang juga terjalin hubungan dengan wilayah Barat, seperti Romawi. Para raja memegang peranan penting dalam perdagangan antar kerajaan tradisional, yang cenderung memiliki sistem kapitalis dalam politik. Sebagai contoh, perdagangan internasional di kawasan Asia-Pasifik mencapai puncaknya pada masa kejayaan Sriwijaya, perdagangan memainkan peran penting dalam menciptakan berbagai peluang dan secara signifikan mendukung penyerapan tenaga kerja yang bersifat independen dalam perjalanan ekonomi Indonesia (Labara,2017)

Kejayaan suatu negeri ditentukan oleh ukuran wilayah negara, pertumbuhan tahunannya, dan tingkat perkembangannya. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan dan kekayaan. Kerajaan di Sumatera didasarkan pada perniagaan, sedangkan di Jawa, didasarkan pada pertanian dan perniagaan. Di masa lalu, pelayaran kolonial menjadi semakin dominan. Penelitian ekonomi Indonesia, Perekonomian Indonesia mengacu pada sistem ekonomi yang saat ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan kebijakan ekonomi negara, yang mencakup kebijakan yang difokuskan pada isu-isu yang berkaitan dengan uang, inflasi, dan masalah ekonomi lainnya.(Ayu Ketut,2022).

Perkembangan Periode Indonesia pra Kemerdekaan

1. Periode kolonialisme

Periode Pra-Kolonialisme didefinisikan sebagai periode antara berdirinya berbagai pemerintahan di Nusantara (sekitar abad ke-5) dan dimulainya penjajahan yang secara sistematis menilai kapasitas ekonomi dan politik wilayah Nusantara (sekitar abad ke-15 sampai 17). RI belum berdiri. Secara umum, kerajaan-kerajaan merupakan pemimpin masing-masing wilayah. Indonesia menempati posisi penting yang strategis dalam lanskap geopolitik antara Asia dan Eropa, serta antara Pakistan dan India. Satu jalur sutra, atau jalur sutra laut, membentang dari Tiongkok dan India ke India melalui Malaka. Ada yang menuju Persia melalui Suriah ke Tengah, Merah ke Merah melalui Mesir, dan akhirnya ke Tengah (Van Leur) dari sini. Perdagangan maritim antara India, Thailand, dan Indonesia dimulai pada abad pertama, dan Indonesia juga memiliki hubungan dengan wilayah Barat (wilayah Romawi).

Menurut Van Leur, perdagangan pada era kerajaan-kerajaan tradisional bercorak kapitalis politik, dengan pengaruh raja-raja yang signifikan dalam jenis perdagangan ini. Misalnya, pada era Sriwijaya, perdagangan internasional antara Asia-Pasifik dan Asia-Eropa mencapai puncaknya. Para bangsawan dan raja-raja memperoleh kekayaannya dari berbagai



pajak dan upeti. Tidak ada perlindungan terhadap jenis produk yang dimaksud karena mereka hanya dirugikan oleh banyaknya "mampir" kapal.

Keberhasilan suatu negara ditentukan oleh luas wilayah negara tersebut, pertumbuhan tahunannya, dan tingkat pembangunannya. Hal ini disebabkan oleh kekuasaan dan kekayaan. Perniagaan adalah fondasi kerajaankerajaan di Sumatera, sedangkan pertanian dan perniagaan adalah fondasi Jawa. Pelayaran niaga lah yang cenderung lebih dominan di masa pra kolonial. Namun dapat dikatakan bahwa di seluruh Indonesia, pertanian dan perniagaan mempunyai dampak yang cukup besar terhadap perekonomian negara indonesia.(Muhammad Rapii,2022).

2. Periode kolonialisme

a. Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Di Hindia Belanda, sistem merkantilis mengalami perkembangan yang signifikan. Belanda membuka peluang bagi kita untuk memperkenalkan Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie). Tujuan utama VOC adalah menjalin kemitraan antara karyawan Belanda dengan perusahaan-perusahaan imperialis lainnya, seperti EIC (East India Company) dari Inggris. VOC juga diberikan hak istimewa (octrooi) yang mempermudah operasional di Belanda dan India, diantaranya:

- 1) Hak mencetak uang
- 2) Hak memberhentikan dan mengangkat pegawai
- 3) Hak menyatakan bahwa perang dan damai
- 4) Hak untuk menciptakan angkatan yang unik
- 5) Hak untuk menciptakan perjalanan menggunakan raja-raja.

Sebagai "penguasa" Hindia Belanda, undang-undang ini akan menjadikan penggunaan VOC sebagai hal yang ilegal. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh perekonomian Nusantara telah dipengaruhi oleh VOC. Sejak tahun 1620, VOC hanya menawarkan komoditas ekspor sesuai dengan permintaan pasar Eropa, yaitu rempah-rempah. Tujuan dari perdagangan kota dan pelayaran jalur yang dibahas adalah untuk mempertahankan status monopoli atas komoditas yang dimaksud. VOC belum mengembangkan mekanisme untuk mendukung kebutuhan dasar sektor swasta.

b. Pendudukan Inggris (1811-1816)

Landrent (pajak tanah) digunakan dalam bisnis Inggris untuk menggambarkan hasil pola pajak yang telah digunakan Belanda selama hampir dua tahun. Sistem ini telah berhasil diterapkan di India, dan Thomas Stamford Raffles memprediksi bahwa penerapan sistem serupa akan berhasil pula di Belanda dan India. Selain itu, rakyat umum diperkirakan akan memiliki cukup uang untuk membeli barang-barang yang diimpor dari India atau yang diproduksi di Inggris, dengan menggunakan pendapatan dari sewa tanah. Menurut imperialisme modern, tanah tidak hanya tidak layak untuk dieksplorasi, tetapi juga merupakan tempat penjualan barang-barang dari negara penjajah.

Akan tetapi, perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam perekonomian ini sulit dilaksanakan, dan bahkan dapat mengakibatkan menurunnya jumlah orang-orang berbahasa Inggris yang sudah ada di Belanda, India. Beberapa penyebabnya adalah sebagai berikut:

- 1) Orang-orang Belanda, India, pada umumnya bersifat huruf dan tidak terlalu peduli dengan uang, bahkan jika itu untuk menyingkirkan pajak tanah.
- 2) Jumlah pegawai tanah pengukur dari Inggris sendiri selalu bertambah.



- 3) Karena Inggris tidak sepenuhnya memahami keberhasilan pertempuran secara turun-temurun, kebijakan ini tidak diterima dengan baik oleh raja-raja dan para bangsawan.
- c. Cultuurstelstel

Sistem tanam paksa (Cultuurstelstel) dimulai pada tahun 1836 dengan berdirinya Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk menghasilkan berbagai komoditas yang diminati di pasar global. Johannes Van den Bosch membuat prosedur untuk meminta pemilik hewan peliharaan membuang barang-barang ekspor seperti tebu, tembakau, kopi, dan nila di bagian terpisah dari properti mereka sendiri. Sistem ini jelas menunjukkan sektor swasta, tetapi juga merugikan Belanda, bahkan jika dibandingkan dengan sistem monopoli. Setelah penerapan sistem ganda ini, semua kerugian akibat konfrontasi dengan Napoleon di Belanda terdiam.

Sebagaimana dijelaskan oleh cultuurstelstel, pemerintah Belanda mengembangkan teori tanah dari mazhab klasik, yang menyatakan bahwa tanah muncul dari tanah terbatas. Akan tetapi, pemerintah Belanda menerimanya begitu saja, tanpa harus membayar biaya untuk mengambil alih tanah yang luas dan kian lama. Menurut teori nilai lebih Karl Marx, leih semacam ini meningkatkan semangat Belanda sebagai kapitalis. Biaya kian besar seperti ini meningkatkan penderitaan masyarakat umum. (Muhammad Rapii, 2022).

- d. Masa Pendudukan Jepang dan Revolusi Kemerdekaan 1942-1950

Jepang memperkenalkan program yang dikenal sebagai Kinkyu Shokuryo Taisaku (Tindakan-tindakan Mendesak Mengenai Bahan Makanan) di sektor pertanian pada bulan November 1943. Program ini mencakup berbagai topik, termasuk pengenalan varietas baru, inovasi dalam teknik penanaman, pengembangan infrastruktur pertanian, kebutuhan sawah, dan propaganda serta pelatihan bagi petani. Upaya untuk meningkatkan produksi bahan baku sandang, seperti kapas, rami, yute, rosela, dan sisal, juga signifikan di sektor perkebunan. Namun, perkembangan signifikan lainnya yang telah terjadi sejak zaman Belanda di India telah meningkatkan tingkat produksi mereka secara signifikan (Kurasawa).

Perkembangan Perekonomian Indonesia Orde Lama

Pemerintah masih dalam tahap awal menjalankan tugasnya, yang terhambat oleh situasi politik dan sosial yang menyulitkan pemerintah untuk berfungsi secara efektif dan membuat kebijakan. Berbeda dengan pengelolaan moneter yang sedang berlangsung, Peristiwa ini terjadi karena besarnya pengeluaran yang diperlukan untuk dua pertempuran besar—yakni perebutan Irian Barat dan konflik dengan Malaysia serta Inggris—serta sejumlah pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia (Tambahan, 2006b). (Puspita Maelani, 2023)

Berikut ini adalah beberapa contoh kabinet-kabinet perkembangan perekonomian orde lama:

1. Kabinet Mohammad Hatta

Kebijakan moneter pada masa reformasi pemerintahan Mohammad Hatta melalui devaluasi mata uang nasional. Hasil utama dari devakuasi ini adalah penurunan nilai uang, yang saat ini kira-kira 50 persen dari semua uang yang dipegang pada bulan Maret 1950 dan yang dipegang oleh De Javasche Bank, yang memiliki nilai nominal lebih dari 2,50% dari uang Indonesia.

Rencana pembangunan ekonomi pertama, yang dikenal sebagai Rencana Urgensi Perekonomian (RUP), dibentuk pada masa Kabinet Natsir (kabinet pertama di Republik Indonesia). (2020, Zulkifli). RUP didasarkan pada sejumlah pendekatan strategis yang



dirancang untuk mengatasi masalah ekonomi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara tepat waktu dan efisien. Dan digunakan dengan nama Rapelita selama era baru.

2. Kabinet Sukiman

Kabinet Sukiman merupakan kabinet yang beranggotakan dua orang yang mulai bekerja pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir pada tanggal 3 April 1952. Beberapa program kerja Kabinet Sukiman antara lain adalah memelihara ketenteraman dan ketertiban, menjamin agar rakyat dan hukum agraria sesuai dengan kebutuhan rakyat, mempercepat laju usaha umum, melancarkan politik internasional secara aktif, dan membawa Irian Barat ke wilayah RI tepat waktu (Arta & Margi, 2014:131). Hasil yang diperoleh selama periode ini tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan kabinet yang sekarang hanya memiliki sedikit sekali anggota yang tersisa. (Arta, 2020).

Kabinet Sukiman mengubah nama De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia (BI) dan melaksanakan program pemutakhiran sistem kurs berganda.

3. Kabinet Wilopo

Kabinet ketiga Indonesia demokrasi parlementer adalah Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo terbentuk setelah jatuhnya kabinet Soekiman yang disebabkan oleh skandal MSA. Kabinet ini terdiri dari anggota partai politik dan sejumlah ahli yang tidak terikat dengan partai politik mana pun. Program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Wilopo memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan program-program yang diterapkan oleh kabinet-kabinet sebelumnya (Bole, M.J.T, 2021).

Pada masa Kabinet Wilopo mereka menerapkan kebijakan yang lebih spesifik, seperti memperkenalkan gagasan anggaran berimbang dalam keuangan pemerintah, mendisiplinkan impor, memodernisasi Angkatan Perang dengan mengurangi jumlah pegawai dan meminimalkan anggaran pengeluaran pemerintah.

4. Kabinet Burhanudin dan Kabinet Ali 1

Kabinet Ali diawali dengan tugas-tugas berikut: mendisiplinkan impor dan kebijakan ketat uang, yang dilakukan untuk mendatangkan banyak uang, dan Program Benteng, yang menguraikan tugas-tugas yang meliputi pengiriman uang ke Indonesia, pemberian bantuan khusus untuk perusahaan swasta, dan pembatalan 4 (sepihak). Tujuan konferensi Meja Bundar adalah untuk menantang sistem ekonomi kolonial atau untuk menantang dominasi Belanda dalam ekonomi Indonesia (Tambunan, 2006).

Situasi ekonomi di Indonesia, terutama setelah nasionalisasi semua perusahaan asing di Belanda, telah membaik dibandingkan dengan situasi ekonomi sepanjang masa Belanda dalam berbisnis. Contoh lain adalah peningkatan tajam inflasi yang terjadi pada tahun 1950-an. (2020, Zulkifli).

Perkembangan Perekonomian Indonesia Orde Baru

Masa Orde Baru memiliki hubungan langsung dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Periode ini ditandatangani dengan beberapa tahapan konstruksi yang telah ditetapkannya. Namun, perjalanan Orde Baru juga kurang menyeluruh, yang berdampak pada kondisi perjalanan ekonomi. Ordo Baru memulai pemerintahannya dengan berbicara tentang stabilitas ekonomi dan politik. Tiga fokus utama program pemerintah adalah pengamanan kebutuhan pokok rakyat, investasi keuangan negara, dan pengendalian inflasi.

Dahulu, ketika sistem ekonomi liberal diterapkan, hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis sektor swasta mengungguli bisnis sektor non-swasta. Akibatnya, pihak berwenang



mengadopsi regulasi perekonomian yang terbaru dengan adanya demokrasi Pancasila, dan pengaruh pemerintah dalam masalah ekonomi berangsur-angsur berkurang. Meski begitu, ajaran Keynes terus menjadi sumber inspirasi bagi pemerintahan negara. Dahulu, ketika sistem ekonomi liberal diterapkan, hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa bisnis sektor swasta mengungguli bisnis sektor non-swasta. Akibatnya, pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi baru melalui demokrasi Pancasila, dan pengaruh pemerintah dalam masalah ekonomi berangsur-angsur berkurang. Meski begitu, ajaran Keynes terus menjadi sumber inspirasi bagi pemerintahan negara. (Basuki Pujoalwanto).

Perkembangan Perekonomian dan Masa Krisis Pada Masa Reformasi

Era reformasi ditandai dengan dimulainya era tatanan baru setelah hampir 32 tahun berkuasa. Masa reformasi dimulai pada tahun 1998 dan berlanjut hingga saat ini. liberalisasi ekonomi, desentralisasi kekuasaan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi tantangan utama. (Dzaki, M. A., Rahmawati, R., & Al-Haris, A. D. 2024)

Beberapa pemerintahan yang terlibat dalam masa reformasi antara lain:

1) Pemerintahan Presiden BJ. Habibie

Selama masa jabatannya, BJ. Habibie tidak melakukan penelitian apa pun tentang kebijakan ekonomi. Hal ini dikarenakan Presiden BJ. Habibie menjabat dalam pemerintahan yang berumur pendek. Selama masa tersebut, tugas Presiden BJ. Habibie antara lain adalah menjaga stabilitas politik. Program IMF dimulai pada masa pemerintahan Presiden Habibie.

Selain fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Habibie juga bertujuan untuk meningkatkan kehidupan politik dan demokrasi karena stabilitas politik yang kuat, yang akan meyakinkan investor asing dan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, sudah terjadi perbaikan sejak tahun 1999 yang sempat menunjukkan tren negatif meski masih cukup rendah.

Perkembangan ini mengindikasikan bahwa kondisi ekonomi Indonesia mengalami pemulihan. Inflasi yang semula tinggi mulai berkurang, sementara nilai tukar rupiah menunjukkan penguatan. Gejolak sempat terjadi pasca lepasnya Timor Timur dari Indonesia, namun situasi tersebut bersamaan dengan pelaksanaan pemilu multipartai demokratis pertama setelah era Orde Baru, yang menghasilkan terpilihnya Presiden Gus Dur sebagai pemimpin negara selanjutnya.

2) Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

Sejak masa kepemimpinan Presiden KH Abdurrahman Wahid, terdapat transformasi signifikan dalam tingkat literasi, baik dalam aspek sosial maupun politik. Banyak pihak profesional yang kini memandang literasi sebagai indikator penting dalam mengukur stabilitas dan kemakmuran suatu negara. K.H. Abdurrahman Wahid dikenal sebagai seorang penganut ideologi Islam liberal. Prinsip-prinsip tersebut meliputi pemahaman tentang rahmat, ampunan, kasih sayang Tuhan, dan kewajiban kita untuk memasukkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam interaksi kita dengan orang lain. (Nurhada, A., & Agesti, Y. Z. (2021)

Tujuan perbaikan kondisi ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid belum tercapai. Kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid mengakibatkan tingkat inflasi yang sangat tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan kurangnya pertumbuhan ekonomi. (Ahmadi Usman 2023). Namun, di bawah



pemerintahannya, Presiden Gus Dur kadang-kadang menimbulkan kontroversi, melontarkan ucapan-ucapan yang kontroversial, dan menghambat kegiatan usaha. Hal ini juga membuat Presiden lebih independen dari DPR. Penyebab utama ketidakstabilan politik tersebut adalah terjadinya beberapa kerusuhan di daerah.

Pergerakan IHSG antara 30 Maret 2000 dan 8 Maret 2001, menunjukkan penurunan yang disebabkan oleh lebih banyaknya aktivitas perdagangan daripada aktivitas investasi di pasar saham negara tersebut. Hal ini menyoroti kurangnya kepercayaan umum antara pelaku bisnis dan masyarakat umum terhadap prinsip-prinsip ekonomi Indonesia, terutama selama periode pendek. indikator dari dua pergerakan tukar rupiah nilai terhadap dolar AS. Pada awal tahun 2000, nilai rupiah sekitar 7.000 dolar AS, dan pada bulan April 2001, mencapai 12.000 dolar AS.

3) Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

Setelah Presiden Abdurrahman Wahid meninggalkan jabatannya, Presiden Megawati Soekarno Putri mengambil alih jabatan presiden Indonesia. Megawati melanjutkan keadaan ekonomi Indonesia yang kurang memuaskan, dengan nilai tukar dolar terhadap rupiah yang berbalik menjadi Rp 12.000 dan tren IHSG yang terus meningkat. Hal ini menyoroti kurangnya kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Megawati Soekarno Putri, Presiden, perlu menyikapi persoalan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang terjadi di Indonesia. Selain persoalan hukum, Presiden Megawati Soekarno Putri juga punya persoalan ekonomi. Permohonan pembayaran utang senilai US\$ 5,8 Milyar di Paris Club ke-3 merupakan salah satu kebijakan ekonomi yang disebutkan Presiden Megawati Soekarno Putri.

Kondisi ekonomi ini tercermin dari peningkatan berbagai indikator ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga acuan, inflasi, neraca pembayaran, dan defisit APBN. Hal ini mendorong pemerintah Megawati untuk melanjutkan reformasi struktural dan restrukturisasi sektor perbankan. Selama periode kepemimpinan Megawati, privatisasi BUMN dilakukan dengan mempertimbangkan aspek untung rugi. Meski privatisasi dianggap penting untuk efisiensi dan mengatasi defisit, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mentransaksikan aset negara kepada perusahaan asing.

4) Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Ekonomi saat ini menunjukkan kestabilan yang baik, dengan pertumbuhan yang terus berlanjut dan kepercayaan dari para investor yang semakin kuat. Beberapa indikator ekonomi, seperti laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar dolar, memperlihatkan tren positif ini. Dari tahun 2008 hingga 2009. Perekonomian dunia masih berada di tengah krisis, khususnya di Amerika. Namun, krisis tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi Indonesia.

Pada dua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, berbagai tindakan terkait perekonomian Bangsa Indonesia dilakukan. Pertama, kebijakan terkait pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini menimbulkan kontroversi di masyarakat karena menaikkan harga bakar minyak. Selain bahan bakar minyak, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberlakukan bantuan langsung tunai. Banyak masyarakat yang menilai BLT tidak ada.

Demi meningkatkan pendapatan setiap warga negara, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tengah melaksanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran. Hal ini dilakukan untuk menarik investor asing guna mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.



5) Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Setelah dua periode pemerintahan SBY, perekonomian Indonesia dapat dikatakan relatif stabil, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Namun, masih ada beberapa masalah yang perlu ditangani, dan hal ini telah ditangani oleh Joko Widodo, presiden pada akhir tahun 2014. Masalah yang menarik tentu saja adalah besarnya subsidi APBN yang mempersempit ruang fiskal, pasar bebas ASEAN yang mulai tumbuh cepat, dan ekonomi global yang mengalami kesulitan sejak tahun 2014 hingga 2015.

Selama pemerintahan Jokowi, Indonesia mengalami pertumbuhan yang tidak terduga pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian global dan sektor kesehatan di banyak negara. Di Indonesia, krisis ini menyebabkan berbagai ketidakstabilan, seperti terjadinya kontraksi dalam laju pertumbuhan ekonomi serta lonjakan inflasi yang mempengaruhi daya beli masyarakat (Sangjaya,B.,Noviarita,H.,& Hilal,S 2022).

Pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana sektor ekonomi menjadi fokus utama setelah isu kesehatan. Kombinasi faktor domestik dan global telah memicu pelemahan ekonomi nasional. Untuk mencegah terjadinya krisis yang lebih dalam, diperlukan langkah cepat dalam menangani situasi tersebut. Oleh karena itu, proses pemulihan ekonomi harus dirancang dengan matang dan segera diimplementasikan tanpa penundaan (Anjani,P.S., Cahyo, B.D., Praditha, E., Alfarizi, F. D., & Noviarita, H. 2023).

Pandemi COVID-19 memperburuk tantangan terkait pembiayaan dan pinjaman. Situasi ini diperparah oleh minimnya aktivitas pemberian pinjaman (lending) dan meningkatnya tingkat penarikan dana, yang pada gilirannya memperbesar kebutuhan dana oleh BMT. Pandemi ini tidak hanya memperumit kondisi likuiditas lembaga keuangan, termasuk BMT, tetapi juga menggarisbawahi kerentanan sektor tersebut. Meski ada BMT yang tetap mampu menyediakan dana, keberlanjutan kegiatan peminjaman memerlukan intervensi dan dukungan aktif dari pemerintah. Lebih jauh, krisis ini juga berdampak signifikan pada industri keuangan Islam secara global, di mana pertumbuhan lembaga koperasi Islam mengalami pelambatan, sehingga menempatkan sektor tersebut dalam posisi yang rentan (Laili, A., & Noviarita, H.2021).

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan bahwa masa pandemi bukan sekadar periode pencapaian kemenangan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan berbagai upaya signifikan dalam pembangunan dan mendorong kemajuan yang berkesinambungan. Salah satu bukti nyata dari kemajuan ini terlihat pada pertumbuhan ekonomi yang berhasil mencapai angka 5,3%. Pencapaian ini ditopang oleh stabilitas ekonomi domestik dan kinerja ekspor yang solid. Selain itu, dalam aspek perpajakan, defisit fiskal telah berhasil ditekan hingga kembali mendekati angka 3% pada tahun 2022. Program Hilirisasi juga terbukti memberikan kontribusi positif dengan mendorong peningkatan nilai ekspor mineral Indonesia (Yayat Sudrajat,2024).

KESIMPULAN

Sejarah perekonomian Indonesia merupakan kompilasi dari berbagai pengaruh, mulai dari sistem ekonomi tradisional hingga modern. Akibat kolonialisme, perang, dan berbagai kebijakan pemerintah, Indonesia telah mengalami perubahan dramatis sejak era pra-kolonial, yang ditandai dengan pertanian dan perdagangan. Sejarah perekonomian di Indonesia ditandai dengan eksploitasi sumber daya laut secara intensif dan sistem tanam paksa.



Dalam sejarah perekonomian Indonesia terdapat perkembangan masa pra kemerdekaan dalam pra kemerdekaan ini dibagi menjadi periode prakolonialisme dan kolonialisme. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia orde lama mengalami pergantian 4 kabinet yaitu kabinet Muhammad Hatta, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali dan kabinet Burhanudin.

Sedangkan dalam perkembangan perekonomian Indonesia orde baru itu identik dengan masa pemerintah presiden Soeharto pada masa itu dikenal dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi agendanya namun proses orde Baru juga penuh dengan dinamika sehingga kondisi berjalan perekonomian juga seiring dengannya.

Sejarah perekonomian pasca krisis ekonomi pada masa reformasi itu diantaranya ada pemerintahan presiden BJ Habibie, pemerintahan Abdurrahman Wahid, pemerintahan Megawati Soekarno putri, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, dan pemerintahan presiden Joko Widodo.

Dalam pemerintahan BJ Habibie beliau menjaga stabilitas politik, pemerintah presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini tingkat inflasi yang sangat tinggi, mata uang yang tidak stabil, dan kurangnya pertumbuhan ekonomi, sedangkan dalam pemerintahan presiden Megawati Soekarno putri yaitu Melaksanakan proses privatisasi BUMN, pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dan juga melaksanakan pembangunan infrastruktur besar-besaran Dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, meskipun menghadapi berbagai tantangan besar, salah satunya adalah pandemi Covid-19. Ekonomi Indonesia mencatatkan angka pertumbuhan sebesar 5,3%, yang didorong oleh kinerja ekspor yang menguat serta kestabilan dalam pertumbuhan ekonomi domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Usman, (2023). *Buku ajar Pengantar Ilmu Ekonomi*. Klaten: Nasmedia
- Arta, K. S. (2020). *Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 Di Indonesia*. Jurnal Widya Citra, 1(2), 69-85.
- Ayu Ketut, (2022). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Rizmedia Pustaka Indonesia
- Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia*. (Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris: Yogyakarta, Graha Ilmu
- Bole, M. J. T. (2021). *Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif Di Indonesia Pada Masa Kabinet Wilopo Dan Upaya Melawan Gerakan Sparatisme*, (Doctoral dissertation : Univeersitas Mahasaraswati Denpasar)
- Detikedu, *Culturestelsel sistem Tanam Paksa*, (<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5715313/cultuurstelsel-adalah-sistem-tanam-paksa-ini-sejarah-dan-kebijakannya> Diakses 29 oktober 2024)
- Dzaki, M. A. Rahmawati. R & Al-Haris A. D. (2024), *Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia Pada Masa Reformasi*, sSindoro : Cendikia Pendidikan
- Inanna, & Nurjannah. (2023). *PEREKONOMI INDONESIA*. Penerbit Tahta Media.
- Labara, M. D. (2017). *Pengaruh Modal Kerja Dan Jenis Usaha Terhadap Pendapatan Bersih Pedagang Kaki Lima Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pedagang Kaki Lima Di*



- Pasar Way Halim Bandar Lampung Tahun 2017*) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Muhammad Rapii,(2022).*Perekonomian Indonesia*. Jawa Barat:CV Jejak, Anggota IKAPI
- Nurhuda, A., & Agesti, Y. Z. (2021). *Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)*. Tarikhuna: Journal of History and History Education, 3(1), 113-123.
- Puspita Maelani,(2023).*Perekonomian Indonesia*.Sumatera Barat: CV.Gita Lentera
- Sangjaya, B., Noviarita, H., & Hilal, S. (2022). *Pengaruh makro ekonomi terhadap profitabilitas perbankan syariah di masa pandemi COVID-19*. Derivatif: Jurnal Manajemen, 16(2), 323-331
- Umi, N. T., Apriani, R., Sari, M. P., Pundarika, R., & Noviarita, H. (2022). *Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Tingkat Pertumbuhan Di Indonesia Dalam Pandangan Islam*. Salam (Islamic Economics Journal), 3(2), 101-109.
- Lestari, N., Pasha, P. A., Oktapianti, M., & Noviarita, H. (2021). *Teori Pembangunan Ekonomi*. REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 2(2), 113-128.
- Laili, A., & Noviarita, H. (2021). *Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid 19*. ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 13(2), 54-61.
- Anjani, P. S., Cahyo, B. D., Praditha, E., Alfarizi, F. D., & Noviarita, H. (2023). *Peranan Pemerintah Dalam Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan Pasca Pandemi Covid-19*. Salam (Islamic Economics Journal), 4(1), 1-13.
- W.S,Winkel,(1983). *Psikologi pengajaran*. Jakarta : Gramedia
- Yayat Sudrajat,(2024).*Perekonomian Indonesia*. Banten: SADA KURNIA PUSTAKA